

KEISLAMAN NEGERI MUSLIM

Kontestasi dan Konsep Negara Agama Perspektif Gus Sholah dan Gus Dur

Siti Qomala Khayati

STAINU Temanggung

hayatiqomala@gmail.com

Abstract: This article will discuss discursive concept of Islamic State and its implication to the built norm of Muslim society; either inside or integrated nation which Islam became a major religion, such as Indonesia, Malaysia, and so on. This article also will explore the conceptions of two Nahdlatul Ulama' scholars, the son of Religious Manister in Older Era, namely: A. Wahid Hasyim. Methodologically, this article is qualitative research based on library and phenomenological approach. In the conclusion, this article found that, rarely, Islamic stance will make Muslim become un-progressive caused their beliefs contestation inside, no solidarity action of Moslem to make mutual understanding, and in the end as critical substances of this research was Islam as ideology just appears in campaign of politics in public sphere; neither an actual beliefs to build the nation without comparing the system. Therefore, the Islamic stance on Islamic Nation, actually, must be substantive values for building the nation, not only an ideology to contest itself or political identity as a Muslim.

Keywords: Negara Islam, Sholahuddin Wahid, dan Abdurrahman Wahid

PENDAHULUAN

Kontestasi politik dalam perumusan ideologi sebuah negara merdeka, selalu, tidak dapat dipisahkan dari pengaruh internasional. Sebagai contoh, Negara Turkey yang hari ini berusaha mengembalikan nalar kesejarahannya dikomandoi oleh Erdogan, sempat diberi pilihan oleh pemimpin mereka bernama, Kemal Pasha at-Tatruk, menggunakan bahasa “Terbelakang sebagai negara Islam atau Maju seperti negara-negara di Eropa”. Kala itu, Negara Islam Sekuler pertama dalam sejarah Islam modern, memilih mendekat dengan Eropa, daripada bersama-sama membangun dan membentuk kekuatan sesama Islam dibawah naungan Ottoman Empire – yang sudah menduduki negara itu bertahun-tahun lamanya.¹ Demikian halnya dengan Republik Islam Iran. Hentakan terhadap negeri Persia untuk berganti system dari negara Islam ke Negara Sekuler juga bukan sekedar gertak sambal. Perjuangan mereka mempertahankan sebagai Negara Islam mendapatkan tantangan sangat kuat; mulai dari embargo ekonomi, serangan meliter, dan tuduhan-tuduhan lainnya, supaya negara Islam ini tidak bisa berkembang dan maju seperti negara lainnya.²

¹ Halen Rose Ebough, *The Ghulen Movement; a Sosiological Analisis of civic movement rooted in moderate Islam* (New York : Springer, 2010), 102

² Nikki R. Kiddie, “Iran: Change in Islam: Islam and Change” dalam *International Journal of Middle East Studies* Vol 11 No 4 Tahun, 1980, 527



Oleh karena itu, dalam konteks ini, penulis sangat bersepakat dengan pandangan Fehullah Gulen, yang menyatakan bahwa, negara Islam – hari ini – tidak bisa dinilai sekedar karena keterbelakangan masyarakatnya semata, melainkan juga ada sisi geopolitik yang menjadikan negara Islam sebagai *lands of war*, pusat jajahan sumber daya alam, dan *framing* sebagai negara yang tidak nyaman atau aman ditempati, menggunakan propaganda media internasional.³ Jikalau demikian adanya, tidak dapat dipungkiri kalau bangsa Indonesia sempat mengalami hal serupa; ada pergesekan masyarakat apakah negara ini akan diformat sebagai negara secular ataupun berdasarkan pada sistem negara Islam – sebagai agama mayoritas.⁴ Pada kenyataannya, para pendiri bangsa dan intelektual muslim, kala itu, memilih sistem integrasi ideology kenegaraan; dimana agama dijadikan nilai sikap dan norma (hukum) social dan menjadi Pancasila sebagai nilai ideology pemersatu perbedaan keagamaan yang hidup serta berkembang di Indonesia.⁵

Sebab itupula, apa yang akan dipaparkan dalam tulisan ini, merupakan sebuah kegelisahan kenapa negara-negara Islam atau negeri yang mayoritas dihuni oleh umat Islam mengalami keterbelakangan dari sisi social, ekonomi, dan cukup sering disulut menggunakan paradigma politik. Apa alasan-alasan antropologis umat Islam tidak bisa membangun solidaritas untuk membentuk *unity* (kesatuan) membangun dan saling membantu satu sama lainnya?. Untuk mendeskripsikan kegelisahan tersebut, penulis ingin menggunakan pandangan KH. Sholahuddin Wahid (Gus Sholah) dan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai perspektif melihat perilaku umat Islam di Indonesia. Kemudian, membangun paradigma bagaimana idealnya ber-Islam di dalam sebuah negara demokratis dan negara yang tanpa tapal batas kedaulatan, seperti yang ada saat ini.

GUS SHOLAH *VERSUS* GUR DUR: PERDEBATAN RELASI NEGARA DAN AGAMA

Di awal reformasi, membuka diskusi publik yang cukup menarik. Para tokoh bangsa dan cendekiawan mengurai benang kusut format relasi agama dan negara secara terbuka. Ada sosok Megawati Soekarno Puteri, Nur Chalis Madjid, dan Abdurrahman Wahid, yang sejak awal, menggagas ide pemisahan negara dan agama. Di pihak berbeda, ada Amin Rais, Yusril Ihza Mahendra, dan Sholahuddin Wahid, yang menginginkan agama bisa memberikan pengaruhnya pada negara. Agama tidak bisa dipisahkan dari sistem kenegaraan yang ada di Indonesia. Laiknya usulan M. Syahrir, M. Natsir, dan M. Hatta di era-era awal penggalan sistem ideology negara.

Hal yang menarik terjadi di era tersebut, dimana Gus Sholah dan Gus Dur berdebat secara terbuka di sebuah media massa bernama Media Indonesia waktu itu. Pedebatan ini kemudian dibukukan oleh Tim Pustaka Tebuireng menjadi satu buku berjudul “KH. A. Wahid Hasyim dalam Pandangan Dua Puteranya”. Syaifullah Ma’shum, yang memberi hantaran buku ini mengatakan, diskusi dua tokoh bangsa ini berasal dari sumber kegelisahan yang sama, yakni; pemikiran KH. A. Wahid Hasyim dan

³ Nevval Sevindi, *Contemporary Islamic Conversation: M. Fethullah Gulen on Turkey, Islam and The West* (New York: State University of New York Press, 2008), 39

⁴ Alwi Sihab, *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, (Bandung, Mizan : 1998), 40

⁵ A. Qadri Azizy, *Hukum Nasional Elektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Jakarta: Teraju, 2004), 138



problematika kebangsaan. Pemikiran KH. A. Wahid Hasyim, dalam pandangannya terkait relasi agama dan negara, diinterpretasikan Gus Dur sama seperti Kemal Pasha at-Tatruk. Tidak dengan Gus Sholah, ia beranggapan KH. A. Wahid Hasyim tidak menginginkan hal tersebut. Sedangkan dari sisi kesamaan, keduanya, gelisah akan perilaku umat Islam yang koruptif, intoleran, dan memanipulasi agama sebagai kepentingan politik.⁶

Untuk lebih lengkapnya, Gus Sholah, menanggapi pandangan sekularisasi Gus Dur dengan mengatakan di akhir tulisannya, sebagaimana kutipan berikut:

“Penulis (Gus Sholah, *pen*) beranggapan, bahwa negara Pancasila yang berketuhanan seperti yang kita jalani saat ini adalah suatu bentuk perwujudan hubungan Islam dan negara yang sudah tepat dan proporsional, dengan catatan bahwa masih ada beberapa akses/akses yang harus diperbaiki. Upaya untuk mengubahnya menjadi negara Piagam Jakarta- yang ditafsirkan sebagai negara di mana akan memasukkan sebanyak mungkin syaria Islam ke dalam hukum positif – atau mengubahnya menjadi negara sekuler yang tidak menginginkan adanya satu pun ketentuan syariat Islam ke dalam hukum positif, akan mendapat tantangan sebagian besar umat Islam.”⁷

Tanggapan di atas, diungkapkan oleh Gus Sholah terhadap Gus Dur yang sebelumnya mengatakan, negara Pancasila memiliki makna; *pertama*, Pancasila adalah persoalan duniawi, tidak ada hubungannya dengan urusan *urkhrawi*. Sehingga, ber-Pancasila tidak diperlukan dampingan dari pakar Islam atau Syariah. *Kedua*, Pancasila bukan basis yurisdiksi bernegara. Pasalnya, dengan begitu, negara akan didebat oleh persoalan-persoalan keagamaan, dan mengakibatkan posisi agama tidak sama di hadapan semua pemeluk agama. Dengan bahasa yang sederhana, Pancasila tidak bisa digunakan untuk membenarkan perilaku agamawan, yang mengatakan, ada nilai agama di dalam Pancasila, lalu mereka bertindak intoleran kepada agama lain. Terakhir, Gus Dur mengatakan negara harus bisa berdiri sendiri serta menggunakan sudut pandang kesetaraan dan kesamaan di depan hukum. Dan, itulah yang digagas oleh KH. A. Wahid Hasyim; yang liberal dan dinamis dalam pemikirannya.⁸

Perdebatan masih berlanjut, solusi Gus Sholah yang mengatakan bangsa Indonesia punya rumus Pancasila untuk mengintegrasikan paradigma hukum ditanggapi Gus Dur secara politis. Bagi Gus Dur dalam tulisan “Terserah Suara Rakyat” dinyatakan bahwa paradigma berpancasila umat Islam di Indonesia merupakan sikap mendua (tidak tegas). Pun demikian dengan sikap Gus Sholah. Bagi Gus Dur pandangan Gus Sholah tak lebih dari seorang politisi yang sedang menggunakan komunikasi politik berbasis identitas keislaman. Sehingga, Gus Sholah menghadirkan syaria Islam di bawah naungan Pancasila. Padahal, sejatinya, kata Gus Dur, produk hukum nasional harus memilih antara keduanya, agar tidak ada ambiguitas; disaat hukum Islam dan Pancasila memiliki pandangan berbeda pada sebuah kasus tertentu.⁹ Pada intinya, Gus Dur sangat konsisten negara harus memisahkan diri dari nilai-nilai keagamaan apapun supaya negara bisa

⁶ Tim Pustaka Tebuireng, KH. Abdul Wahid Hasyim dalam Pandangan Dua Puteranya (Jombang; Pustaka Tebuireng, 2018),

⁷ Ibid,

⁸ Ibid,

⁹ Ibid,



menghasilkan produk hukum yang mewakili seluruh sisi-sisi kehidupan masyarakat yang plural. Sebuah produk hukum yang repretatif dari nilai-nilai kebudayaan yang ada di Indonesia.

Tak lama berselang, Gus Sholah menanggapi tulisan tersebut dengan judul “Pancasila, Jalan Tengah Kita”. Pada tulisan ini, Gus Sholah menyatakan tidak ada kaitan keberadaan dirinya di Partai Kebangkitan Umat (PKU) dengan pandangannya secara akademis di laman pemberitaan media. Ia pun menegaskan tetap menghormati dan mengagumi eksistensi Gus Dur sebagai seorang kakak. Tapi, dalam hal berpandangan, keluarga KH. A. Wahid Hasyim memberikan ruang diskusi yang luas. Oleh karenanya, ia menuangkan kegelisahan selanjutnya menjadi beberapa topik penting; *pertama*, bagi Gus Sholah sudah ada banyak contoh hukum Islam yang diserap oleh hukum nasional. Sehingga, mempersoalkan pertentangan hukum Islam dan Hukum Nasional tidak pada konteks yang tepat. *Kedua*, secara politik, Indonesia sudah pernah membangun negara sekuler; setidaknya hingga 1946. Setelah itu, keberadaan Kementerian Agama yang dibentuk oleh negara pun menjadi penanda bahwa negara Indonesia sangat akomodatif terhadap keberadaan agama. Maka dari itu, Pancasila yang religious, merupakan manifest yang menunjukkan kalau jalan tengah itu sudah ada dan terbukti. Dan terakhir, Gus Sholah juga memastikan pilihan pada jalan ketiga ini, bukan sikap mendua. Melainkan prinsip untuk tetap memilih jalan yang disediakan sesuai realitas politik kebangsaan yang ada di Indonesia.

Perdebatan akhir dua tokoh bangsa ini ialah ditulis dengan judul “Menghindari Negara berasumsi Agama” oleh Gus Dur, dan “Biarkan Sejarah Menilai” oleh Gus Sholah. Dalam tulisan ini, Gus Dur kembali mempertanyakan posisi agama pada gagasan yang ditulis sang adik. Gus Dur memberikan contoh negative (*the dark side*) apabila agama dianggap legal untuk mengatur negara di beberapa daerah, seperti di Minang, Aceh Darussalam, dan Goa. Bagi Gus Dur, dua daerah ini sudah membuktikan bahwa keberadaan agama dijadikan sebagai wujud ornamental. Agama tidak masuk pada nilai-nilai prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara (*civilized citizenship*). Maka dari itu, mengindari agama menghiasi negara merupakan sebuah keniscayaan. Demikian sebaliknya, negara tidak boleh banyak mengatur sisi-sisi privat di dalam agama, karena itu akan mengusik nalar keberagamaan orang lain. Dan itulah sejarah dunia yang menganut intervensi agama akan negara ataupun negara pada agama.¹⁰

Adapun narasi yang dibungkus dalam “Biarlah Sejarah Yang Menilai” oleh Gus Sholah terbagi menjadi tiga pandangan penting; *pertama*, ada pengaruh pandangan Barat di dalam diri Gus Dur, sehingga ia menganggap apa yang dilakukan oleh para intelektual muslim tidak berdampak apapun akan perumusan ideology kebangsaan. *Kedua*, pemisahan agama dan negara, berdasarkan pandangan KH. Wachab Chasbullah, seperti memisahkan gula dari kopi. Jadi, hal itu sangat sulit dilakukan oleh siapapun yang berusaha untuk menjalankannya. Serta, secara factual, juga dinyatakan Gus Sholah integrasi agama dalam negara sudah terwujud, bukan angan-angan semata. Fakta empirisnya bisa dilihat melalui UU Perkawinan, dan produk hukum lainnya. *Ketiga*, berisi tentang kekhawatiran Gus Sholah akan terjadinya sekularisasi di kalangan anak muda NU atau warga NU secara luas. Kekhawatiran itu lalu disimpulkan dengan mengutip ungkapan KH. A. Wahid Hasyim sebagaimana berikut: “...Maka buat masa depan yang

¹⁰ Ibid,



*dekat, akan terjadinya salah satu dari tiga kemungkinan sebagai berikut; pertama, partai gajah ini pecah menjadi dua; dan dengan demikian di Indonesia ada suatu kombinasi yang lucu dari gerakan Islam, yakni gerakan nasionalitas Islam dan Komunis Islam”.*¹¹

Dari kombinasi dialektis di atas, penulis ingin menyimpulkan beberapa hal penting sebagai jembatan (*bridging*) terhadap pembahasan selanjutnya. *Pertama*, kegelisahan Gus Sholah ataupun Gus Dur memiliki konteks “mencari format negara” pasca kejadian reformasi. Arus sekularisasi dan Islamisasi memang sangat kuat diwacanakan, baik itu di kalangan akademisi ataupun sikap politik sekalipun. Maka dari itu, tidak ada persoalan sejatinya, apabila Gus Sholah dan Gus Dur mengidentikkan pandangannya pada Partai Politik yang sedang didirikan atau dinahkodai. *Kedua*, konsistensi sikap Gus Sholah yang mengimpikan agama bisa memiliki kontribusi pada negara, seraya mengingatkan orang akan kegigihan M. Natsir mempengaruhi Soekarno. Sebaliknya, prinsip Gus Dur untuk memisahkan agama, juga merepresentasikan sikap prinsipnya yang teguh menjaga kesamaan hak agama di bawah kanopi kenegaraan. *Ketiga*, pelajaran penting lainnya ialah semua gagasan yang disampaikan tidak akan bisa dilepaskan melalui paradigma keislaman waktu itu. Apa kondisi dan bagaimana corak umat Islam di bawah naungan negara Indonesia, penulis akan menjabarkannya pada bagian selanjutnya.

GUS SHOLAH DAN GUS DUR: PERILAKU KEISLAMAN DAN PROGRESIFITAS MEMBANGUN BANGSA

Mengasaskan pada pandangan Syaifullah Ma’shum dalam suntingan buku tersebut, yakni sebenarnya kedua tokoh bangsa ini memiliki kegelisahan yang serupa: kenapa negara Islam atau umat Islam terbelakang?. Kenapa negara-negara yang mencampuradukkan ideology keagamaan, tidak bisa semaju negara-negara yang memisahkan urusan ke-duni-annya?. Benarkah agama tidak bisa menjadi solusi untuk membangun karakter dan nilai-nilai kebangsaan? Benarkah agama sekedar ornament politik yang digunakan untuk menumbuhkan sikap emosional dalam kontestasi politik?. Lalu bisakah agama tampil sebagai solusi?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut, sejatinya, tidak bisa dijawab sekedar pada dialektika teks pasca reformasi itu. Ada banyak tulisan dua tokoh yang sejatinya berusaha mensublimasi nilai-nilai keislaman sebagai prinsip berbangsa dan bernegara. Walaupun, harus penulis akui, perdebatan ideologis di atas, menjadi bingkai teori umum kedua putera KH. A. Wahid Hasyim tersebut.

Gus Sholah dalam buku “*memadukan keindonessian dan keislaman*” membuat analisis mendalam kenapa umat Islam dan negara dimana pemeluk Islam menjadi mayoritas berdomisili, distigmatisasi sebagai negara yang “mengalami kemunduran”, baik dari sisi politik, ekonomi, dan stabilitas social. Menurut Gus Sholah, stigma keterbelakangan diakibatkan oleh instrumentasi akademik yang dibuat oleh seorang peneliti itu sendiri. Ada anggapan bahwa korelasi agama dan negara berada variable yang *dependent*. Artinya, agama selain menjadi sistem, juga dijadikan nilai utama pengaturan normative kehidupan individu mereka. Adapula yang beranggapan bahwa agama sebagai

¹¹ Ibid,



variable *independent*. Agama bukan sistem negara, melainkan sekedar dianut mayoritas penduduk negara tersebut.¹²

Pada versi sistem keagamaan yang jadi sistem negara, harus diakui, sudah banyak terjadi konflik di dalam negara itu. Pakistan, Afghanistan, Yaman, dan beberapa negara lainnya. Stabilitas politik yang cukup baik hanya ditunjukkan oleh Arab Saudi dan Iran. Pasalnya, kedua negara tersebut memiliki sistem dan konsesi ekonomi yang cukup kuat di mata dunia. Sedangkan negara mayoritas Islam, Gus Sholah mengapresiasi capaian Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Turki. Negara-negara yang mayoritas Islam ini bisa membingkai seluruh instrumentasi “negara maju”¹³ dengan sangat baik. Bagaimanakah dengan Indonesia? Di akhir tulisan tersebut Gus Sholah sekedar menyatakan bahwa umat Islam di Indonesia tidak perlu mengambil sikap defensive terhadap laporan dan stigmatisasi yang dibangun pada riset itu. Umat Islam harus bisa membuka diri untuk merubah *mindset* agar agama benar-benar bisa memberikan dampak yang baik kepada pengembangan negara Indonesia.¹⁴

Rasionalisasi agar umat Islam tetap membuka diri terhadap kritik, menurut Gus Sholah, disebabkan tidak adanya kesinambungan nilai-nilai agama terhadap perilaku yang dipraktekkan umat Islam di Indonesia, bahkan bagi mereka yang sebenarnya taat beribadah. Gus Sholah, di dalam buku kecil tersebut, menyentil perilaku para pejabat di Indonesia yang beragama Islam, melalui ungkapan salah seorang artis yang mengaku tidak taat beribadah, dan terjerumus pada perilaku seksual yang menyimpang. Pengakuan sang artis dianggap Gus Sholah lebih “elok” didengarkan dibandingkan mereka yang suka beribadah, namun masih menyelewengkan kewenangannya demi kepentingan pribadi dan keluarga mereka sendiri.¹⁵ Pun demikian dengan kondisi umat Islam hari ini yang sudah tidak lagi dipilah menjadi abangan atau santri. Masyarakat abangan yang beragama Islam, sejatinya, sudah melakukan praktek keagamaan Islam. Namun, nihil dan gersang untuk merubah sikap kebudayaan yang terjadi di lingkungan masyarakat itu sendiri.¹⁶

Hal lain yang banyak diulas oleh Gus Sholah di dalam pelbagai tulisannya ialah “khazanah” keislaman yang tak kunjung bisa berdamai dengan nilai-nilai kebudayaan bangsa Indonesia; apakah ideology, kebhinnekaan, intoleransi hingga politik Indonesia. Isu-isu yang seharusnya selesai semenjak Indonesia mendeklarasikan mengakui keberadaan agama, budaya, dan etnisitas lain; dikala sistem politik sudah diberikan seluas-luasnya kepada seluruh elemen masyarakat, tidak lagi dikontrol oleh pemerintah seperti dua orde sebelumnya. Jadi, bagi Gus Sholah, energy utama umat Islam di Indonesia – dalam reduksi pemahaman penulis – harus habis memikirkan bagaimana mereka membentuk branding kesalehan beragama, bukan membangun kesalehan social berdasarkan nilai-nilai agama itu sendiri. Bagi Gus Sholah, nilai dasar beragama adalah kemapanan diri untuk bisa menerima perbedaan, menghargai pandangan orang lain, dan bisa dipraktekkan sebagai tauladan bagi kelompok agama lain yang ada di Indonesia.

Oleh karena itulah, jalan keluar dari persoalan tersebut, yang ditawarkan oleh Gus Sholah, bisa disimpulkan menjadi empat bagian penting; *pertama*, menghayati nilai

¹² Shalahuddin Wahid, *Memadukan Keindonesiaan dan Keislaman; Esai-Esai Kebangsaan...* 128

¹³ Negara Maju yang dimaksud adalah negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang baik, kemajuan di bidang teknologi, dan stabilitas politik. Contoh negara maju dalam konteks Islam dimaksud, lebih difokuskan pada sisi keunggulan kehidupan social-ekonomi mereka yang lebih baik daripada negara lainnya. Ibid, 130

¹⁴ Ibid, 131

¹⁵ Ibid,

¹⁶ Ibid,



ibadah, keimanan, dan keislaman sebagai bentuk tanggung jawab individu yang akan dilihat orang lain. *Kedua*, mengalihkan energy keagamaan menjadi sikap-sikap social yang lebih produktif. *Ketiga*, membingkai “narasi damai dan toleran” di dalam beragama, sehingga nafas keagamaan akan menjadi stimuli positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. *Keempat*, menjadikan agama sebagai pijakan *empowerment* masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, bisa saja, menggunakan pendekatan ideologis ataupun melalui pendekatan structural; asalkan tujuan akhir dari proses tersebut ialah ke-maslahatan bagi seluruh umat manusia yang ada di negara tersebut.

Bagaimanakah dengan Gus Dur? Pandangan Gus Dur terkait posisi agama dalam kehidupan sehari-hari, tentunya, lebih banyak dibaca masyarakat daripada karya-karya yang dibuat oleh Gus Sholah. Karya Gus Dur tentang agama dan pemberdayaan, agama dan ideology, agama dan negara, secara garis besar terangkum dalam buku “Islamku, Islam Kita, dan Islam Anda”.¹⁷ Agar memiliki *framing* yang sama dengan apa yang penulis tuangkan untuk mendekomposisi pemikiran Gus Sholah, maka khusus pemikiran Gus Dur penulis akan mengulas tiga konsepsi penting, yakni; moralitas individu seorang muslim dan cita-cita keumatan, orientasi kebangsaan dan gerakan kelompok Islam, dan terakhir solusi yang ditawarkan Gus Dur untuk menjadi umat Islam di sebuah negara yang plural seperti di Indonesia.

Ada tulisan Gus Dur berjudul “Kaum Muslimin dan Cita-Cita” dalam buku yang disunting Ahmad Suaedy dkk (direktur The Wahid Institute), yang mengindikasikan berbicara moralitas kehidupan berislam di Indonesia. Bagi Gus Dur pada tulisan tersebut, umat Islam dibagi menjadi dua kelompok besar; *pertama*, umat Islam yang hidup seadanya tanpa gerakan dan warna ideologis apapun. Ia menikmati kehidupan lumrahnya masyarakat umum; apakah dia beragama ataupun tidak. *Kedua*, umat Islam yang terafiliasi dengan organisasi dan warna ideologis tertentu. Ia mencontohkan bagaimana umat Islam dikategorisasikan menjadi NU, Muhammadiyah, dan organisasi lainnya. Dan, kelompok ini, cenderung memiliki cita-cita, sekaligus “menggunakan” agama sebagai representasi gerakan mereka. Gus Dur memberikan contoh bagaimana reaksi umat Islam ini pada fenomena Inul Daratista, kala itu. Gus Dur menganggap tanggapan para tokoh agama ini sebagai bentuk dari formalisme hukum yang disematkan terhadap masyarakat yang tidak tahu hukum Islam secara ideal. Dampaknya, respon dari para tokoh itu, tidak banyak merubah apapun dari sisi moralitas keagamaan umat Islam itu sendiri. Pasalnya, ungkapan itu diwakilkan pada keinginan (cita) sekelompok orang yang berorganisasi, bukan dair masyarakat umum.¹⁸

Maka dari itu, Gus Dur memberikan catatan terhadap fenomena tersebut sebagaimana kutipan berikut:

“Kita harus merubah moralitas masyarakat dengan sabar, agar sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang kita yakini kebenarannya, dengan memberikan contoh yang baik sebagai wahana utama dalam pembentukan moralitas yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Hal ini yang tampaknya sering tidak disadari beberapa tokoh Islam maupun beberapa perkumpulan kaum muslimin. Masyarakat kita sekarang ini memiliki kemajemukan sangat tinggi, kalau kita tidak menyadari hal

¹⁷ Ibid,

¹⁸ Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, (Jakarta: The Wahid Institute, 2006),



ini, kita akan mudah marah dan bersikap “memaksakan” kehendak kepada masyarakat...Karena itu dalam pandangan penulis, perlu diperhatikan bahwa cita-cita kaum muslimin dibagi dua, yaitu antara keinginan kaum muslim yang tidak memasuki perkumpulan gerakan Islam manapun, dan cita-cita para warga gerakan Islam. Tanpa adanya perhatian terhadap perbedaan ini, maka apa yang kita anggap penting, tidak begitu diperhatikan oleh kaum muslim yang lain. Akibatnya kita akan kehilangan hubungan.”¹⁹

Kutipan di atas juga ditegaskan oleh Gus Dur dengan memberikan contoh bagaimana para tokoh bangsa melakukan perubahan kebudayaan di Indonesia. Mereka tidak menggunakan cara-cara yang memaksa keberadaan orang lain, melainkan lebih mengupayakan cara yang lebih mudah dipahami masyarakat itu sendiri.

Demikian halnya konteks kenegaraan, umat Islam, dan persoalan yang dihadapi. Bagi Gus Dur kehadiran Islam, idealnya, menjadi solusi dan stimuli bagi umat Islam untuk bertindak sesuai nilai-nilai universalisme; apakah itu Hak Asasi Manusia, kesejahteraan, pengembangan ekonomi, pemerintahan yang bersih, dan pemberdayaan antar sesama umat beragama. Pada BAB IV buku “Islamku, Islam Kita, dan Islam Anda”. Gus Dur megulas sangat banyak bagaimana pandangan Islam terhadap persoalan tersebut. Bagaimana Islam mendukung kesetaraan. Islam mendukung Ekonomi masyarakat kecil. Islam menjadi solusi bagi kesenjangan kehidupan social. Islam sebagai alternative merubah budaya birokrasi yang dijalankan oleh pemerintah, dan hal lainnya. Berdasarkan pada pemikiran itupula, penulis ingin menarik kesimpulan bahwa, sebenarnya, keberadaan agama pada kehidupan masyarakat buat Gus Dur bukanlah “penutup” gerbang kemajuan, malahan sebaliknya. Hanya saja, apatisme muncul karena sikap yang ditampilkan umat Islam itu sendiri. Sikap yang jauh dari nilai-nilai substantif ajaran Islam-Profetik (baca; berdasarkan nilai-nilai kenabian).

Terakhir, terkait jalan keluar yang ditawarkan Gus Dur menghadapi ambiguitas sikap keislaman di Indonesia ialah “pentingnya” pemisahan agama dari negara, sebagai implikasi dari fakta empirik dimana negara agama sulit memajukan negaranya. *Kedua*, walaupun harus menggunakan paradigma keagamaan, maka nilai agama yang tampil di lingkungan masyarakat dan kenegaraan harus substantif serta universal. Artinya, tauladan keislaman yang ditampilkan bermuara dari kesadaran kesalehan social dan menjunjung tinggi sikap yang ditunjukkan para tokoh Islam di masa lalu. *Ketiga*, Gus Dur juga sangat menekankan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi nilai utama umat Islam bertindak. *Keempat*, penyebaran nilai-nilai keagamaan di masyarakat haru mengedepankan pendekatan kebudayaan daripada ideologis. Tidak boleh ada pemaksaan dalam beragama, karena hal itu akan berdampak pada persepsi masyarakat itu sendiri pada agama yang dianutnya.

KESIMPULAN

Pada akhir tulisan ini, belajar dari pelbagai perdebatan dua tokoh keturunan pendiri Nahdlatul Ulama’ (NU) di atas. Penulis ingin memberikan beberapa catatan penting; *pertama*, perdebatan akademik yang dijalani le dua tokoh bangsa ini bukan sesuatu yang statis. Isu relasi agama dan negara merupakan *living discourses* yang selalu hadir pada setiap transisi politik dan kepemimpinan nasional. Oleh sebab itulah, pada sisi

¹⁹ Ibid,



sikap, umat Islam di Indonesia harus menyadari kalau keberadaan agama – bagaimanapun bentuk kenegaraan yang akan dijalankan – akan terus mewarnai. Progresifitas *khazanah* yang harus dikedepankan umat Islam ialah tidak lagi menjalankan “sikap memaksa” sebuah keyakinan pada khalayak umum. Pasalnya, ideology kemajemukan – oleh kedua tokoh tersebut – sama-sama diyakini keberadaannya.

Kedua, berdasarkan pada kesamaan sikap kedua tokoh tersebut, umat Islam di Indonesia harus bisa mengambil pelajaran bahwa Umat Islam tidak harus selalu disebutkan oleh persoalan-persoalan keagamaan di Indonesia. Umat Islam, idealnya, mulai memikirkan cara menggeser perdebatan yang sekedar mempersoalkan nilai-nilai keagamaan di lingkungan masyarakat. Kedua tokoh tersebut, menawarkan cara agar agama dihadirkan sebagai sikap yang holistic, dan tidak menjadikan satu-satunya ideology kebangsaan dan kenegaraan yang ada di Indonesia. Gus Sholah, meski masih menginginkan ada nilai keagamaan dalam merumuskan aturan negara, tidak berkeinginan untuk mengganti ideology Pancasila. Lebih-lebih sang kakak, ia sudah mengusulkan agar umat Islam tidak sibuk, maka negara menjaga jarak terhadap agama; dan agama tidak mengarahkan pemerintah mengatur kehidupan orang lain.

Ketiga, corak Umat Islam di negara Islam pun – harusnya – direpresentasikan dengan nilai-nilai modernitas. Pengakuan Gus Sholah terhadap negara Malaysia, UEA, dan lain sebagainya, merupakan sebuah model akan keislaman yang ideal; dalam konteks pembangunan dan pengembangan sebuah negara. Pun demikian dengan tawaran Gus Dur, yang acapkali, menyatakan kalau negara-negara Islam yang memiliki basis pengetahuan dan teknologi bagus, seperti Iran, Turkey, dan daerah lainnya, bisa dijadikan contoh bagaimana mereka membangun ideology Islam, serta membangun negara Islam disegani oleh masyarakat di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Shalahuddin Wahid, *Memadukan Keindonesiaan dan Keislaman; Esai-Esai Kebangsaan* Jombang; Pustaka Tebuireng, 2018
- Halen Rose Ebough, *The Ghulen Movement; a Sociological Analisis of civic movement rooted in moderate Islam* New York : Springer, 2010
- Nikki R. Kiddie, “Iran: Change in Islam: Islam and Change” dalam *International Journal of Middle East Studies* Vol 11 No 4 Tahun, 1980
- Neval Sevindi, *Contemporary Islamic Conversation: M. Fethullah Gulen on Turkey, Islam and The West* New York: State University of New York Press, 2008
- Alwi Sihab, *Islam Inklusif, Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung, Mizan : 1998
- A. Qadri Azizy, *Hukum Nasional Elektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Jakarta: Teraju, 2004
- Tim Pustaka Tebuireng, *KH. Abdul Wahid Hasyim dalam Pandangan Dua Puteranya* Jombang; Pustaka Tebuireng, 2018



Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, Jakarta: The Wahid Institute,
2006

